

Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

Alhamdi Fikri¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
alhamdifikri@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : April 1, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

Kuantan Singingi Regency is the only district that does not yet have the title of Child Friendly City in the Riau Province region and does not yet have a Regional Regulation on Child Friendly Districts / Cities. So there are still programs that have not been implemented, including Coordination and Socialization Activities of the Task Force and Preparation of Child Friendly District Action Plans, Strengthening the Children's Forum Division and Strengthening the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) and for facilities and infrastructure supporting Coordination and Socialization Activities The Task Force and Preparation of Decent District Action Plans at the Kuantan Singingi Regency P2KBP3A Service have not met the needs. The dimensions used in Policy Implementation theory are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of this research show that the implementation carried out by the Kuantan Singingi Regency P2KBP3A Service in carrying out the program has not been carried out optimally. Because the appropriate implementation to be implemented is to strengthen the bureaucratic structure which will have an influence on communication between implementers and prepare the resources needed for implementation.

Keywords: *Implementation, Harmony of Policies to Improve the Quality of Children and Women, P2KBP3A Service Kuantan Singingi Regency*

Abstrak

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan satu-satunya kabupaten yang belum mempunyai predikat Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau dan belum memiliki Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak. Sehingga masih adanya program yang tidak terlaksana di antaranya ada Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak, Penguatan Divisi Forum Anak dan Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan untuk sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi belum memenuhi sesuai kebutuhan. Dimensi yang digunakan dalam teori Pelaksanaan Kebijakan ialah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan Dinas P2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan program belum terlaksana secara optimal. Karena pelaksanaan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan dilakukan penguatan Struktur Birokrasi yang akan membawa pengaruh dalam komunikasi antar pelaksana dan mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Dinas P2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi*

Pendahuluan

Di Indonesia khususnya masalah kesejahteraan sosial masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan sosial memang tidak dapat dihindari keberadaannya di masyarakat seperti masalah sosial yang ada di daerah dan perkotaan. Masalah sosial yang berkaitan dengan kebijakan publik yang menjadi sorotan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut seharusnya menggunakan pendekatan pelayanan yang terbuka.

Sebagai penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Indonesia yang akan menjadi generasi pembangunan nasional sehingga akan menjadikan penentu keberlangsungan serta keutuhan sebuah negara khususnya Indonesia yaitu anak, yang merupakan anugerah terindah tidak ternilai bagi setiap orang tua. Kehadiran seorang buah hati merupakan hal yang paling di nanti bagi sebuah keluarga. Pertumbuhan demi pertumbuhan dan setiap perkembangan buah hati akan menjadi pusat perhatian orang tua. Anak merupakan aset terbesar bagi orang tua, anak juga merupakan potensi yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah bangsa.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan satu-satunya kabupaten yang belum menyandang predikat Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau, yang peniliannya dilakukan secara intensif sejak tahun 2014. Pada tahun 2022 Kabupaten Kuantan Singingi kembali tidak mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Dan pada tahun 2023 Kabupaten Kuantan Singingi sedang mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak dan pada saat ini masih tahap evaluasi penilaian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Per Mei 2023.

Kabupaten Kuantan Singingi sampai pada saat ini belum juga mempunyai Peraturan Daerah tentang Kabupaten/kota Layak Anak untuk mengatur Mitigasi dan pelaksanaan pada program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal.

Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi memiliki program dalam rangka perwujudan Kabupaten Layak Anak, yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan yang bertujuan untuk meningkatnya wawasan dan keterampilan anak, meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan juga terwujudnya Predikat Kota Layak Anak pada Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak di kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1

Realisasi Kinerja Kegiatan pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Kegiatan	Tujuan	Target	Realisasi	Presentase
1	Koordinasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Kasi Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya Perlindungan terhadap hak-hak Anak	40	0	0%
2	Penguatan Divisi Forum Anak	Terciptanya Divisi Forum Anak	70	60	86%
3	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Hak Perempuan P2TP2A	25	0	0%

Sumber : Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021

Dari tabel 1 dapat kita lihat, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi terlampir pada rencana kerja Dinas bahwa memiliki permasalahan pada 3 kegiatan yang mana program tersebut belum sepenuhnya mencapai target dari rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2

Data Sarana Prasarana dalam menunjang Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Nama Barang	Dibutuhkan		Tersedia	
		Jumlah	Unit	Jumlah	Satuan
1.	Laptop	6	Unit	4	Unit
2.	Printer	12	Unit	10	Unit
3.	Ac Split	14	Unit	11	Unit

Sumber : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

Dari tabel 2 Berdasarkan prawawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, Sarana dan prasarana yang ada pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dalam menunjang Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi belum mencukupi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas Adapun fenomena dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi adalah Masih adanya kegiatan dalam suatu program kerja yang belum terlaksana yaitu, Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak, Penguatan Divisi Forum Anak, Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Sumber: Renja DP2KBP3A 2021 Kabupaten Kuantan Singingi), Sarana dan Prasarana penunjang Kegiatan Koordinasi Dan Sosialisasi Gugus Tugas Dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi belum memenuhi sesuai kebutuhan seperti laptop yang dibutuhkan 6 unit sedangkan yang tersedia 4 unit, printer yang dibutuhkan 12 unit sedangkan yang tersedia hanya 10 unit, AC split yang dibutuhkan 14 sedangkan yang tersedia hanya 11 unit. (sumber:Prawawancara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi).

Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010-96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi dan (4) Stuktur birokrasi.

Komunikasi adalah proses pengalihan ide atau informasi dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku.

Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.

Disposisi adalah tanggapan atau instruksi yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk segera di tindak lanjuti.

Stuktur Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas tugas agar lebih teratur.

Metode

Tipe penelitian adalah deskriptif karena peneliti ingin mengetahui hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya tentang bagaimanakah Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian metode yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini yaitu metodologi kualitatif, hal ini dikarenakan metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono 2018:213) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan serta hasil analisis teori Edward III (2014) dapat dibuat proporsi Mayor yaitu "Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika pembagian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan tugasnya."

Hipotesis mayor Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika dilakukannya sosialisasi kebijakan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan kepada seluruh element yang terlibat agar mengetahui informasi mengenai kebijakan tentang Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup untuk menajalankan kegiatan dengan fasilitas yang memadai, selain dari pada itu juga pelaksana kebijakan juga harus memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan serius dalam melakukan kebijakan. Pembagian tugas yang terstruktur dan saling melengkapi akan menghasilkan suatu kebijakan yang baik dan terlaksana disamping dengan adanya kerjasama dengan pemerintah lain atau pihak lain melakukan implementasi kebijakan akan dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Tabel 3

Hasil penelitian Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	Hasil Penelitian
1	Komunikasi	Sudah terlaksana penyampaian informasi tentang kebijakan dari 3 sub dimensi yaitu penyampaian informasi tentang kebijakan, pemahaman tentang kebijakan, dan kesadaran melakukan kebijakan.
2	Sumber daya	Belum terlaksana dari sub dimensi antara lain sumber daya manusia, dukungan anggaran atau finansial, dan dukungan fasilitas kebijakan
3	Disposisi	Sudah terlaksana keseriusan dalam menjalankan kebijakan dari 2 sub dimensi yaitu keseriusan dalam menjalankan kebijakan dan pemahaman dan pengetahuan para pelaksana dan keseriusan dalam menjalankan kebijakan
4	Struktur birokrasi	Sudah terlaksana sub dimensi melakukan kerjasama dengan pemerintah lain dalam melakukan tugasnya dari 2 sub dimensi yaitu pembagian tugas yang terstruktur memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi dan melakukan kerjasama dengan pemerintah lain dalam melakukan tugasnya

Sumber: Olahan Penulis 2024

Dari hasil mengenai indikator komunikasi Pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, serta hasil analisis teori Edward III (2014), dapat dibuat Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika informasi tentang kebijakan disampaikan, adanya pemahaman tentang kebijakan dan adanya kesadaran dalam melaksanakan kebijakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil penelitian mengenai indikator sumberdaya Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi serta hasil analisis teori Edward (2014). Dapat dibuat yaitu Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika sumber daya yang memadai serta adanya anggaran yang cukup untuk Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dan mendukung untuk fasilitas dalam pengelolaan cagar budaya.

Pada indikator Sumber Daya Manusia, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi memiliki beberapa pegawai untuk melaksanakan Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan juga menugaskan pegawai honorer untuk melaksanakannya, staf/pegawai yang ada masih memiliki tugas umum dan bertindak sesuai dengan standar dan tanggungjawab dengan tugasnya masing-masing di Bidang Perlindungan Anak. Namun dalam menunjang Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan masih temukan bahwa minimnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang di akibatkan pengalihan anggaran kepada pencegahan pandemic Covid 19.

Dari hasil penelitian mengenai indikator disposisi analisis teori Edward III (2014) dapat dibuat yaitu Pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika pegawai atau pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan kebijakan Pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Peneliti juga melihat dari indikator Disposisi bawasannya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan sudah ditugaskan oleh masing-masing pegawai dan berjalan sesuai dengan bidangnya.

Dari hasil penelitian mengenai indikator struktur birokrasi Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan serta hasil analisis teori Edward III (2014) dapat dibuat yaitu Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika pembagian tugas yang terstruktur dan memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan, peneliti juga melihat dari indikator struktur birokrasi, struktur birokrasi berguna untuk mendukung kebijakan telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi baik, langkah pendukung pertama adalah dalam struktur birokrasi adanya SOP (standar operasional prosedur) yang berguna untuk menjadikan standar kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai untuk melaksanakan kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP memang sudah ada dan menjalankannya sesuai dengan SOP yang ada seperti.

Dalam penelitian ini yang menjadi hambatan dalam Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan pendanaan dalam pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dalam implementasi kebijakan, anggaran merupakan kecukupan modal atas satuan program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasarannya apabila anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi berjalannya suatu program.

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti Komputer, Laptop, Printer dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan Pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.
 - a. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan kebijakan tentang Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan sudah berjalan optimal.
 - b. Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan belum cukup optimal, kurang tersedianya fasilitas dalam melaksanakan kebijakan yang dimiliki seperti, komputer, Laptop, Printer yang belum mencukupi.
 - c. Disposisi dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dilihat dari sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan dari segi komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan yaitu pelaksana yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
 - d. Struktur birokrasi dalam Pelaksanaan Program Kebijakan Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pelaksana kebijakan tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan disiplin dalam menjalankan tugasnya.
2. Adapun hambatan dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut:
 - a. Terbatasnya kemampuan pendanaan dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dalam implementasi kebijakan, anggaran merupakan kecukupan modal atas satuan program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasarannya apabila anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi berjalannya suatu program.
 - b. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti Komputer, Laptop, Printer dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan kebijakan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, diantaranya

3. Dengan melakukan sosialisasi antar pelaksana kebijakan secara berkala, agar semua element yang terlibat lebih mengetahui akan ketentuan yang tercantum didalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kuantan Singingi dirasa perlu menambah Sumber Daya Manusia atau pegawai agar program lebih bisa berjalan secara baik. Mengang semuanya bergerak harus dengan anggaran, maka dari itu kedepannya perihal penganggaran Dinas diharapkan dapat lebih memprioritaskan program tersebut.
4. Perihal sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan Dinas sebagai penunjang keberhasilan realisasi kinerja, maka tak luput dari sebuah anggaran keuangan yang mencukupi. Maka dari agar dapat memprioritaskan sarana dan prasana karena sarana dan prasarana tersebutlah guna meningkatkan penyelenggaraan kegiatan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta Bandung.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta Bandung.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi Revisi). Bandung : CV Alfabeta Bandung.
- Akbar, Husaini Usman Dan Purnomo Setiady, 2011. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara
- Ali, F. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada
- Ali, Faried. 2007. Hukum tata Pemerintah & proses legislatif Indonesia. Jakarta: Rajawali press
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar

Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.

- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.

- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.

- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.

- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP

KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.

- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Ali, Zaina dan Raden Imam Al Hafis. 2015. Teori kebijakan publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Beddy Iriawan Maksudi. 2017. Dasar-Dasar Administtrasi Publik. Depok: Rajawali pers
- Budi Winamo. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta : Gramedia
- Edi Suharto. Ph. D. 2012. Analisis kebijakan publik. Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Bandung, ALFABETA CV
- Fitriah, mustiqowati Ummul, 2017 studi implementasi kebijakan kota layak anak (KLA) di kota pekanbaru jurnal ilmiah ilmu administrasi. Vol. 9 No 2 hal 160-161
- Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marianai. 2017. Imlementasi kebijakan tentang perlindungan anak (studi kasus anak-anak pengemis di kecamatan mandau). Vol. 14. No 2. Halaman 5-6
- Moelong, Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Meolong, Lexy.2016. Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, D Riant. 2007. Kebijakan Publik (formulasi, implementasi dan evaluasi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
- Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia No.12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota layak anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
- <https://www.goriau.com/berita/baca/marak-anak-jalanan-berkeliaran-di-pekanbaru-sekda-minta-opd-teknis-giat-razia.html>
- Website: www.kemenpppa.go.id